

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hampir disetiap negara berkembang kemiskinan selalu menjadi *trending topic* yang ramai dibicarakan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menempati urutan terbesar ke empat di dunia jika dilihat menurut jumlah penduduknya. Masalah perekonomian makro Indonesia yang selalu menjadi sorotan adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah ekonomi yang harus segera di atasi dan diselesaikan. Meski tidak mungkin untuk dihilangkan tetapi paling tidak dapat dikurangi jumlahnya.

Kemiskinan biasanya didefinisikan sebagai sejauh mana suatu individu berada dibawah tingkat standar hidup minimal yang dapat diterima oleh masyarakat atau komunitasnya. Para ahli membuat pengertian atau definisi dari kemiskinan dengan berbagai versi. Dapat berupa gambaran kekurangan dari sisi materi, kurangnya kebutuhan sosial, pendapatan, akses terhadap sumber-sumber tertentu dan lainnya (Maipita,2014). Menurut Badan Pusat Staistik, Kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan.

Bagi Indonesia, kemiskinan sudah sejak lama menjadi persoalan bangsa, di mana hingga sekarang masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

(Susenas) yang dilakukan BPS, jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan tahun 2009 tercatat masih cukup besar yakni, sekitar 32,5 juta jiwa atau lebih kurang 14,2 persen. Kondisi masyarakat yang hidup dalam kungkungan kemiskinan pada umumnya menderita kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi, lingkungan yang buruk dan ketiadaan akses infrastruktur maupun pelayanan publik yang memadai (Jonaidi,2012).

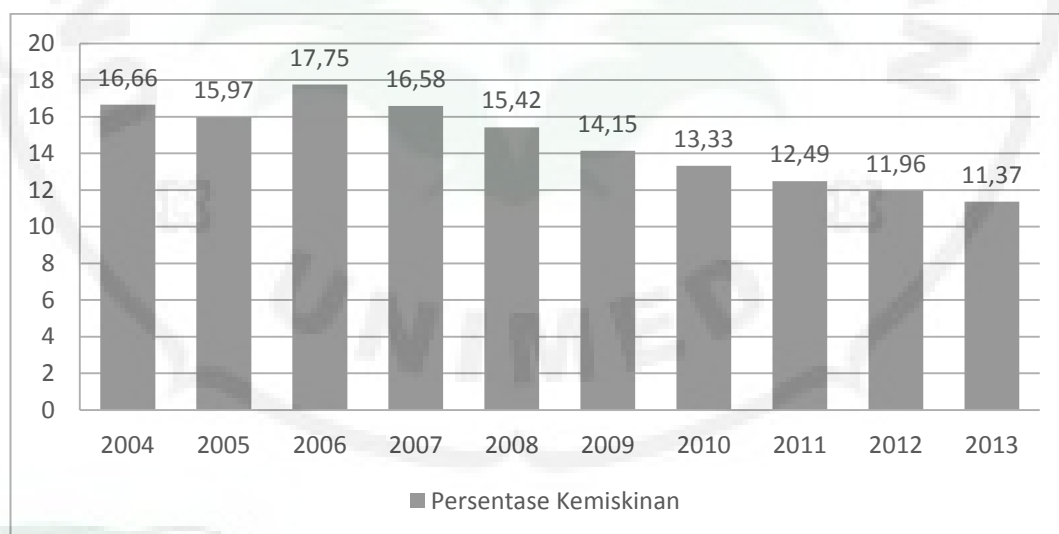
Pemerintah Indonesia tampaknya sangat serius dalam mengatasi masalah kemiskinan. Melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pemerintah meluncurkan program MP3KI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia) yang bertujuan untuk mempercepat pengurangan kemiskinan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi kemiskinan yang tertuang dalam MP3KI difokuskan melalui 4 klaster program, yaitu:

1. Klaster Pertama : Program bantuan dan perlindungan sosial berbasis keluarga, yang bertujuan untuk mengurangi beban kehidupan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Programnya adalah PKH (Program Keluarga Harapan), BSM (Bantuan Siswa Miskin), Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), Raskin (Beras Miskin), dan Bantuan Sosial lainnya.

2. Klaster Kedua : Program pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat miskin untuk dapat terlibat dalam proses pembangunan. Programnya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Penguatan/Pendukung.
3. Klaster Ketiga : Program pemberdayaan usaha mikro dan kecil serta Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kepastian berusaha. Programnya adalah pemberdayaan Koperasi dan UMKM, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR)
4. Klaster Keempat : Program Pro Rakyat, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dasar secara terintegrasi di lokasi-lokasi khusus (daerah pesisir, daerah miskin perkotaan, dan daerah tertinggal). Programnya adalah Rumah Murah dan Sangat Murah, Air Bersih untuk Rakyat, Listrik Murah dan Hemat, Angkutan Murah, Peningkatan Kehidupan Nelayan, dan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan.

Program pemerintah dalam upaya mengurangi angka kemiskinan menunjukkan hasil yang positif dimana dalam 10 tahun terakhir tercatat kemiskinan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada rentang tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 cenderung mengalami penurunan, seperti yang terlihat pada gambar 1.1. Pada tahun 2004

sampai 2005 tingkat kemiskinan turun dari 16,66 persen menjadi 15,97 persen pada tahun 2005. Namun pada tahun 2006 tingkat kemiskinan mengalami kenaikan menjadi 17,75 persen. Hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak pada awal tahun 2006 sehingga mendorong kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan menurunkan daya beli masyarakat. Dampak dari kebijakan tersebut menyebabkan tingkat kemiskinan pada tahun itu bertambah. Pada tahun 2007 hingga 2013 tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan yaitu pada angka 16,58 persen pada tahun 2007 dan pada angka 11,37 persen pada tahun 2013.



Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2004 - 2013

Sumber : BPS 2013 (di olah)

Sumatera Utara sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di Indonesia dengan 33 kabupaten kota yang terdapat didalamnya tentunya merupakan salah satu potensi besar di Indonesia. Pemerintah provinsi Sumatera Utara sebagai unit pemerintah tentunya sangat serius dan terus melakukan upaya

dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya persentase kemiskinan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 angka kemiskinan Sumatera Utara sebesar 11,51 persen sedangkan pada tahun 2013 berada pada angka 10,39 persen.

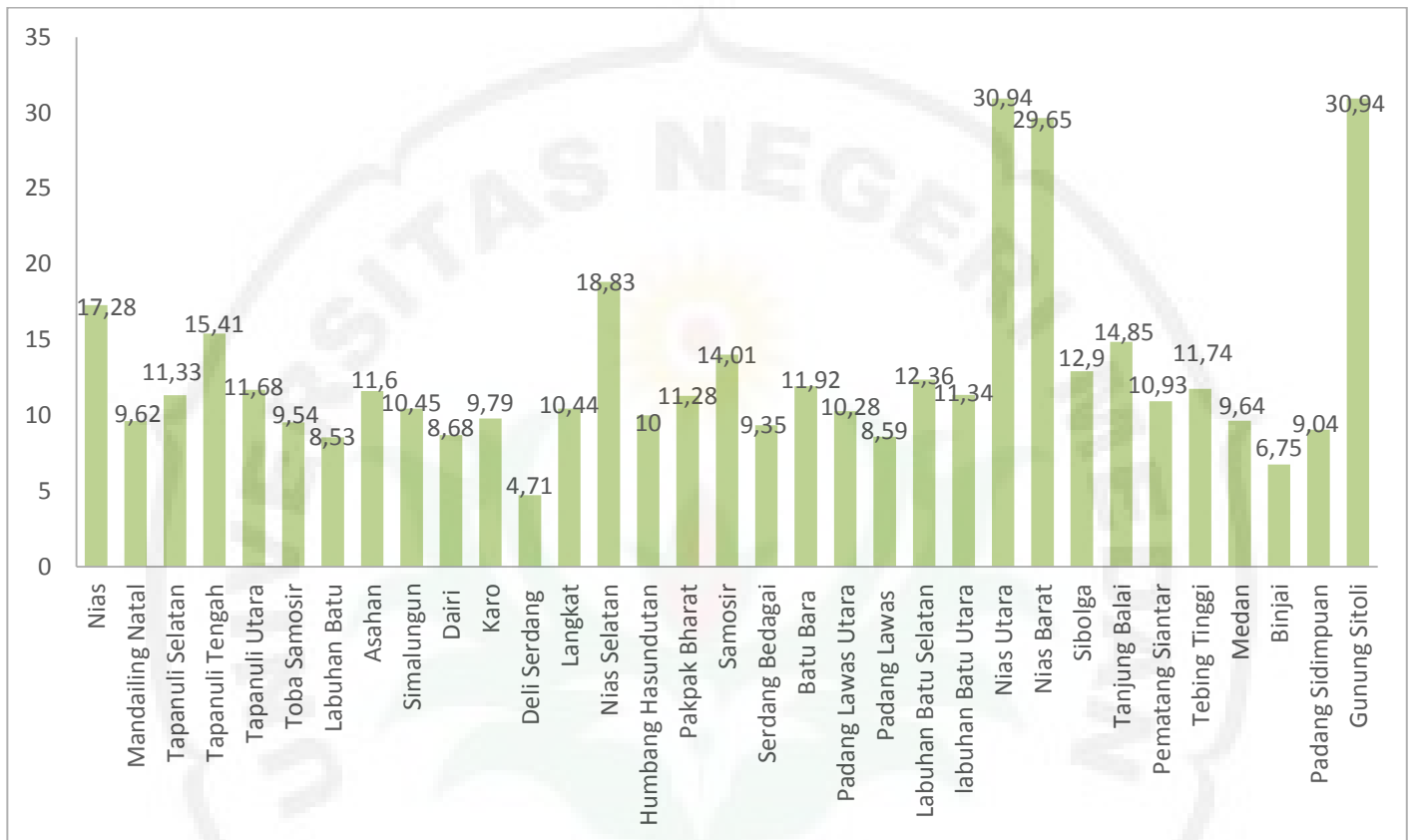
Tabel 1.1

Persentase Kemiskinan di Sumatera Utara Tahun 2009-2013

Tahun	Persentase Penduduk Miskin
2009	11.51
2010	11.31
2011	11.33
2012	10.41
2013	10.39

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara 2013

Pemerataan penanggulangan kemiskinan di Sumatera Utara menjadi salah satu masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Ternyata berkurangnya persentase kemiskinan dalam 5 tahun terakhir di Sumatera Utara belum dapat mewakili tingkat kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. Kondisi sebenarnya di lapangan dari 33 Kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara ternyata ada 22 Kabupaten/Kota yang persentase kemiskinannya pada tahun 2013 lebih dari 10 persen atau dikenal dengan istilah *hardcore poverty*. Dimana daerah yang persentase kemiskinan paling tinggi adalah Kabupaten Nias Utara dan Kota Gunung Sitoli yaitu sebesar 30.94 persen, sedangkan persentase kemiskinan yang terendah di provinsi Sumatera Utara terdapat pada kabupaten Deli Serdang yaitu sebesar 4.71 persen



Gambar 1.2
 Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2013
 Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara 2013

Hal ini tentunya menjadi tugas yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara. Pemerataan pembangunan ke seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara tentunya harus segera dilakukan. Proses pembangunan tentunya memerlukan pendapatan daerah yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Di banyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang

dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang bagus pun menjadi tidak akan berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan (Wongdesmiwati, 2009).

Pertumbuhan ekonomi saja kemungkinan hanya akan menguntungkan sebahagian kecil masyarakat dan meninggalkan sebahagian besar masyarakat miskin. Sedangkan mengutamakan pemerataan saja tanpa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tidak akan dapat meningkatkan kesejahteraan atau hanya berputar pada pemerataan kemiskinan. Oleh karena itu kebijakan ekonomi suatu negara harus disusun untuk lebih *pro-growth* (memacu pertumbuhan ekonomi), *pro-job* (memperluas lapangan kerja), dan *pro-poor* (mengurangkan kemiskinan) (Maipita et al, 2010).

Besaran upah minimum pekerja yang di tentukan oleh kebijakan pemerintah juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Kebijakan upah minimum di Indonesia sendiri pertama kali diterapkan pada awal tahun 1970an. Meskipun demikian, pelaksanaannya tidak efektif pada tahun-tahun tersebut (Suryahadi et al, 2003). Pemerintah Indonesia baru mulai memberikan perhatian lebih terhadap pelaksanaan kebijakan upah minimum pada akhir tahun 1980an. Hal ini terutama disebabkan adanya tekanan dari dunia internasional sehubungan dengan isu-isu tentang pelanggaran standar ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia.

Menurut Undang Undang No 13 tahun 2003 disebutkan bahwa upah minimum hanya ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan

1 (satu) tahun. Dari definisi tersebut, terdapat dua unsur penting dari upah minimum (Sumarsono, 2003) yaitu :

- a) Upah permulaan adalah upah terendah yang harus diterima oleh buruh pada waktu pertama kali dia diterima bekerja.
- b) Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan dan keperluan rumah tangga.

Sumarsono (2003) mengemukakan pula bahwa upah merupakan sumber utama penghasilan seorang pekerja, sehingga upah harus cukup memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dengan wajar. Batas kewajaran tersebut dalam Kebijakan Upah Minimum di Indonesia dapat dinilai dan diukur dengan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) atau seringkali saat ini disebut dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Pada Tabel 1.2 dapat kita lihat bahwa sampai pada tahun 2013 tingkat Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Sumatera Utara terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 tingkat upah minimum sebesar 905.000 rupiah, kemudian naik menjadi 965.000 rupiah di tahun 2010 dan 1.035.500 rupiah di tahun 2011. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2013, dari 1.200.000 rupiah di tahun 2012 menjadi 1.305.000 rupiah.

Tabel 1.2

Perkembangan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2009 – 2013 (dalam Rupiah)

Tahun	UMP	% Kenaikan	Inflasi (%)
2009	905.000	10.07	2.61
2010	965.000	6.63	8.00
2011	1.035.500	7.31	3.67
2012	1.200.000	15.89	3.86
2013	1.305.000	8.75	10.18

Sumber : BPS Sumut Dalam Angka Berbagai Tahun Terbitan, (di olah).

Berdasarkan hasil pengamatan dalam tabel 1.2 diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2010 dan 2013 persentase tingkat inflasi yang terjadi di Sumatera Utara lebih tinggi dari persentase tingkat kenaikan Upah minimum Provinsi. Tingkat kenaikan inflasi yang lebih tinggi dari tingkat kenaikan UMP tentunya membuat kesejahteraan pekerja semakin berkurang.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pendidikan. Korelasi antara pendidikan dan kemiskinan sudah lama menjadi isu sentral di banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat, permasalahan muncul sebagai akibat besarnya subsidi yang diperuntukan bagi kelompok masyarakat miskin (Carey, 2002). Sedangkan di Indonesia permasalahannya terletak pada ketidakadilan dalam memperoleh akses pendidikan antara si kaya dan si miskin. Di mana biaya yang harus dikeluarkan untuk sekolah bagi si kaya dan si miskin relatif sama tanpa melihat latar belakang ekonomi keluarganya (Nurdyana et al, 2012).

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Sitepu dan Sinaga, 2004).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2009 – 2013 mengalami penurunan tingkat kemiskinan pada setiap tahunnya, tetapi penurunan tingkat kemiskinan tersebut tidak merata terjadi pada 33 kabupaten/kota yang ada di provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut guna mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara sehingga nantinya dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas adapun rumusan masalah didalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dan upah minimum Kabupaten/Kota terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan atau menetapkan kebijakan tentang pengentasan kemiskinan Sumatera Utara.
2. Semakin banyaknya penelitian akan semakin terbuka informasi dan cara-cara yang efektif dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Sumatera Utara.
3. Sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan kalangan akademis yang meneliti masalah kemiskinan di Sumatera Utara.